
Motif di Balik Bantuan Jepang untuk Palestina dalam Kerangka CEAPAD

Ryantori

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Kampus Senayan, Jakarta 10270
Email: ryantori4@yahoo.com

Abstract

This paper discusses the main motives behind Japan's foreign aid to Palestine. It is likely that Japan starts to play its role as foreign aid broker. Recently, this country has been inviting other countries, especially in East Asia, to be involved in its foreign aid programs. CEAPAD (Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development) is the example to be mentioned. This is the first time East Asia countries talk together to support Palestine in order to be able to manage foreign aid efficiently. Surprisingly, although this conference used East Asia as its tagline, six of ten ASEAN members (Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam) attended this conference but China as major state in East Asia region did not. At one side, it seems that Japan is trying to get good image from Asian countries in order to challenge the increasing image China has got so far. At the other side, potential market in Arab and Palestine region as well as in Asia—especially East and Southeast Asia—are still in grasp. Whether political or economic motives which drives Japan to put CEAPAD into surfaces, Palestinian Authority and people has had huge expectations from this.

Keywords: foreign aid, national interest, development, regional cooperation

Abstrak

Artikel ini membahas motif utama bantuan Luar Negeri Jepang untuk Palestina. Ini seperti Jepang mulai memainkan peranannya sebagai broker bantuan luar negeri. Baru-baru ini, Jepang mengundang beberapa Negara, khususnya Asia Timur, untuk bergabung di program bantuan Luar Negeri. Salah satunya CEAPAD (Konferensi Kerjasama antarnegara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina). Ini merupakan kali pertama Negara-negara Asia Timur duduk bersama untuk mendukung agar Palestina mampu mengatur bantuan luar negeri dengan efisien. Yang mengejutkan, meskipun konferensi ini menggunakan Asia Timur sebagai *tagline*, enam dari sepuluh anggota ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam) turut hadir dalam konferensi ini, namun China sebagai bagian dari Asia Timur justru tidak hadir. Di satu sisi, terlihat bahwa Jepang mencoba untuk mendapat citra yang baik dari Negara-negara Asia sebagai upaya untuk melawan citra China yang sedang naik. Di sisi lain, pasar potensial di kawasan Arab, Palestina, juga di Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara, masih dalam genggaman. Apakah motif politik atau ekonomi yang menuntun Jepang untuk memunculkan CEAPAD, Otoritas Palestina dan masyarakatnya menaruh ekspektasi besar akan hal itu. Kata kunci: Bantuan Luar Negeri, kepentingan nasional, pembangunan, kerjasama kawasan

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena di dunia internasional yang patut mendapat perhatian—dan secara akademis menarik untuk dikaji—adalah masalah konflik dengan berbagai turunannya, seperti pengungsi, pembangunan kembali sarana dan prasarana yang hancur dan

sebagainya. Salah satu negara yang peduli terhadap masalah ini adalah Jepang melalui program-program bantuan luar negerinya.

Selepas dari kekalahannya pada Perang Dunia II, Jepang terus memacu dirinya hingga saat ini untuk bangkit kembali di tengah kancah dunia

internasional. Dan, dalam kurun waktu yang relatif singkat, negara ini berhasil menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Tidak hanya itu. Negara ini juga berhasil menggunakan kekuatan ekonominya tersebut untuk menjadi salah satu negara donor di dunia. Di titik ini, penulis hendak memberi sebuah gambaran menarik mengenai fenomena peran serta Jepang dalam hal bantuan luar negerinya. Sebagai sebuah negara yang dapat diistilahkan sebagai “negara kaya baru” (jika dibandingkan dengan AS atau Eropa), ternyata Jepang tidak hanya memfokuskan kekayaannya untuk pembangunan domestiknya semata-mata. Banyak sekali kita dengar mengenai bantuan-bantuan yang diberikan Jepang kepada dunia internasional.

Pertanyaan penting yang mengemuka terkait dengan hal tersebut adalah apa alasan utama Jepang di balik pemberian bantuan luar negerinya tersebut? Ada setidaknya 3 alasan penting yang patut digarisbawahi. Pertama, terkait dengan perilaku-perilaku ekspansionis Jepang pada masa Perang Dunia II. Perilaku-perilaku tersebut saat ini ternyata menuai banyak sekali kecaman, terutama jika dilihat dari konteks HAM. Sebagai contoh, para perempuan yang dijadikan sebagai *jugun ianfu* (perempuan untuk pemuas kebutuhan biologis serdadu Jepang) dan mereka yang dijadikan sebagai *romusha* (pekerja paksa), dengan (atau terkadang tanpa) dipelopori oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat lokal maupun internasional, menuntut agar Jepang memberikan kompensasi atas penderitaan yang telah mereka alami. Kompensasi itulah yang kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Jepang sebagai bantuan, baik kepada mereka yang bersangkutan maupun kepada negara di mana mereka menetap. Kedua, terkait dengan kebijakan politik etis yang disuarakan oleh sebagian politisi di Jepang sendiri. Politik etis yang dimaksud di sini adalah semacam politik balas budi—yang dituangkan dalam bentuk bantuan-bantuan internasional Jepang—kepada negara-negara yang telah membantu Jepang, baik secara suka rela terlebih lagi yang dipaksa, pada masa Perang Dunia. Ketiga, terkait dengan posisi Jepang dalam sistem ekonomi global dewasa ini. Dalam sistem ini,

secara sederhana dunia terbagi menjadi bagian: bagian pertama adalah kelompok negara-negara kaya—Jepang termasuk di dalamnya—lajim diistilahkan sebagai kelompok negara Utara (*North*) dan bagian kedua adalah kelompok negara-negara miskin dan sedang berkembang yang lajim diistilahkan sebagai kelompok negara Selatan (*South*).²

Lantas, bagaimana dengan bantuan Jepang pada Palestina belakangan ini? Terlebih dalam kerangka CEAPAD dimana Jepang mengajak beberapa negara Asia Timur terlibat di dalamnya. Pada titik ini, muncul pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan. Apakah bantuan luar negeri yang diberikan semata karena “kemurahhatian” sebuah negara atau lebih disebabkan karena ada motif tertentu dari luar? Apakah sesederhana itu? Tidakkah ada sesuatu yang “*complicated*” di dalamnya?

METODOLOGI

DISKURSUS KONSEP *FOREIGN AID*

Berbicara mengenai konsep *foreign aid* (bantuan luar negeri) dalam bingkai ilmu hubungan internasional, terdapat berbagai perspektif yang membahasnya. Salah satu penulis yang mencoba mengangkat hal tersebut adalah Stefan Cibian³ dalam tulisannya yang berjudul *Foreign Aid in Disarray: Theoretical Gaps and Policy Failures*. Di dalam tulisannya tersebut, dia berusaha membandingkan dua perspektif utama dalam kajian ilmu hubungan internasional, yaitu realis dan liberalis, dalam pembicaraan mengenai bantuan luar negeri.

Dalam perspektif realis, sistem internasional yang anarki menciptakan kebebasan otonomis diantara negara-negara. Hal tersebut membentuk sebuah sistem internasional yang terdesentralisasi dimana setiap negara mempunyai kedaulatan dan *power* sendiri yang khas. Dalam konteks ini, bantuan luar negeri praktis hanya menjadi sebuah alat kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional. Alat kebijakan ini dalam pandangan realis dilihat sebagai sebuah hasil dari Perang Dingin yang digunakan dalam kompetisi diantara kekuatan *great power*. Bantuan luar negeri dipandang sebagai sebuah senjata kunci dalam Perang Dingin untuk memperbesar kemungkinan

beraliansinya negara-negara Dunia Ketiga ke dalam salah satu kubu *great power*.

Masalah utama bagi usaha realis dalam menjelaskan praktek bantuan luar negeri adalah mereka menyangkal tujuan bantuan luar negeri adalah untuk “menolong pembangunan sebuah negara”. Saat melakukannya, realis gagal untuk mengkonstruksi kerangka teoritis bagaimana seharusnya langkah-langkah yang perlu dilakukan agar tujuan “*helping countries to develop*” dapat tercapai. Realisme sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi bantuan luar negeri terhadap pembangunan ekonomi. ‘Bantuan luar negeri untuk pembangunan ekonomi’ dalam pandangan realis hanyalah *label* pada kebijakan negara dalam mengejar power dan supremasi. Efektivitas bantuan luar negeri bagi realisme di evaluasi berdasarkan seberapa loyal negara-negara resipien kepada donor mereka.

Perspektif pemikiran hubungan internasional selanjutnya yang memberikan perhatian cukup besar terhadap bantuan luar negeri adalah liberalism.⁴ Kaum liberal secara tajam menentang pemikiran realis. Jika realis sama sekali tidak menerima ide ‘melakukan pembangunan’ dalam konteks bantuan luar negeri, liberalis tetap mempertahankan visi moral, nilai dan ide yang menyusun dasar bagi penyaluran donor di negara dunia ketiga. Posisi pandangan liberal tentang bantuan luar negeri bukan hanya menawarkan peran dan nilai yang lebih penting, tapi mengambil langkah yang lebih jauh dengan menciptakan harapan akan suksesnya proses pembangunan dengan bantuan luar negeri.

Namun, pandangan liberalisme terhadap praktek bantuan luar negeri mengundang kritik. Pembangunan yang banyak dilakukan saat ini berdasarkan pada arus pemikiran liberal yaitu agenda *good governance* yang banyak di promosikan oleh negara donor. Pembangunan ini memunculkan isu etis bahwa apa yang terlihat adalah aktivitas negara donor dalam sudut pandang politis terlihat telah mencederai prinsip-prinsip *non-interference* pada urusan internal negara lain. Isu etis lainnya yang muncul adalah apakah niat baik mendasari negara donor saat menerapkan pengkondisian tertentu terhadap negara resipien. Fakta

bahwa pengembangan senjata masih belum berkurang dan kriteria operasional donor saat menggelontorkan bantuan yang tidak transparan, membuat sebagian pihak mempertanyakan niat baik donor.

Menarik juga untuk memahami motivasi sebuah negara untuk memberikan bantuannya.⁵ Negara donor memberikan bantuannya pertama-tama karena hal tersebut memang untuk kepentingan politik, strategis dan/atau ekonomi mereka. Walaupun ada juga beberapa bantuan itu yang didorong oleh alasan-alasan moral dan kemanusiaan untuk membantu negara-negara yang kurang beruntung tanpa mengharapkan imbalan. Namun secara garis besar ada 2 motivasi:

a. Motivasi Politik

Motivasi politik merupakan motivasi yang paling penting bagi negara-negara pemberi bantuan. Bantuan luar negeri pertama-tama harus dilihat sebagai tangan panjang kepentingan negara-negara donor. Motivasinya condong berbeda tergantung situasi nasional dan bukan semata-mata dikaitkan dengan kebutuhan negara penerima yang secara potensial berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain.

b. Motivasi Ekonomi

Dalam konteks prioritas strategi dan politik yang luas, program bantuan luar negeri negara-negara maju mempunyai rasional ekonomis yang kuat. Dalam kenyataannya walaupun motivasi politik mungkin merupakan yang utama, namun landasan yang bersifat ekonomis paling tidak merupakan alasan untuk membenarkan motivasi memberikan bantuan.

PEMBAHASAN

KIPRAH JEPANG DENGAN BANTUAN LUAR NEGERINYA

Terkait dengan konsep bantuan luar negeri seperti tersebut di atas, Jepang menurut penulis berada pada posisi yang menarik untuk dikaji. Menarik untuk melihat kiprah negara ini dalam penyaluran bantuan luar negerinya mengingat posisinya yang secara politik internasional tidak terlalu dominan dan bahkan secara ekonomi sedang mengalami kelesuan yang semakin lama semakin kentara pada saat ini.⁶ Sementara di sisi

lain, Jepang terkenal dengan pola bantuan luar negerinya yang ajeg semenjak dia berubah menjadi kekuatan baru pasca keterpurukannya saat Perang Dunia II. Selain itu, Jepang juga terkenal dengan bervariasinya jenis bantuan luar negeri yang disalurkan, dari yang bernuansa kemanusiaan (seperti bantuan terhadap pengungsi, bencana alam, dsb) hingga yang bernuansa ekonomi politik (seperti investasi, *high technology*, dsb).

Satu hal luar biasa yang penulis rasa perlu ditekankan di sini adalah fakta bahwa Jepang mulai menjadi negara pemberi bantuan (*donor country*) sejak 1954. Ini berarti hanya berselang lebih kurang sembilan tahun setelah kehancuran Jepang pada Perang Dunia II, sebuah transformasi dari sekedar negara penerima bantuan hingga menjadi negara pendonor besar di dunia. Pertama kali menjadi negara donor ketika negara ini terlibat dalam Colombo Plan pada 1954 dan menyumbang lebih dari US\$ 221 milyar (sekitar 31.7 triliun yen) dari skema *official development assistance* (ODA) kepada 185 negara. Pada 1989, Jepang menjadi negara pendonor terbesar di dunia untuk pertama kalinya dan bertahan selama kurun waktu 1991 hingga 2001.⁷

ODA Jepang memiliki beberapa karakteristik yang terdiri dari multilateral ODA dan bilateral ODA. ODA bilateral terdiri dari hibah (bantuan hibah dan kerjasama teknis) dan pinjaman-pinjaman ODA (pinjaman-pinjaman proyek, pinjaman-pinjaman non-proyek, dan penjadwalan kembali utang-utang). Bantuan hibah adalah bantuan investasi yang berbentuk proyek fisik seperti bangunan, peralatan dan lainnya yang diberikan kepada negara-negara penerima donor tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Sebagian besar hibah bilateral dilaksanakan melalui JICA (*Japan International Cooperation Agency*) selaku badan resmi pemerintah Jepang. Sedangkan pinjaman bilateral (pinjaman yen) dilaksanakan melalui JBIC (*Japan Bank for International Cooperation*).⁸ Melalui ODA, Jepang berusaha untuk memberikan kontribusi kepada dunia internasional dalam memelihara perdamaian dan memajukan pembangunan dunia, karena hal tersebut pada akhirnya akan memberikan

kontribusi terhadap kemakmuran dan keamanan bagi Jepang sendiri. Hal tersebut seperti yang tertuang di dalam revisi piagam ODA tahun 2003, dimana ditegaskan bahwa ODA akan tetap menjadi salah satu bentuk diplomasi damai Jepang dalam pergaulannya di dunia internasional. ODA Jepang diberikan dengan tujuan untuk membantu negara-negara yang mengalami permasalahan seperti menderita akibat bencana alam dan juga untuk mencoba mengentaskan kemiskinan di berbagai negara di dunia.

Dalam skrup Asia, prestasi besar bantuan Jepang terlihat dalam mengatasi krisis Asia. Krisis Asia adalah krisis finansial yang dimulai pada Juli 1997 di Thailand dan mempengaruhi mata uang, bursa saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand merupakan negara yang paling parah terkena dampak krisis ini.⁹ Dalam krisis ini, Jepang tidak terlalu terkena dampak yang banyak tetapi mengalami kesulitan ekonomi jangka panjang. Ekonomi Jepang memang tidak hancur, tetapi cukup mendapat pukulan yang kuat. Jepang terkena dampak karena ekonomi Jepang memiliki peranan penting di wilayah Asia. Jika dibiarkan, krisis Asia ini juga menuntun Jepang ke arah “kebangkrutan”.

Akan tetapi, Jepang berinisiatif untuk memberikan bantuan untuk mengakhiri Krisis Asia ini yaitu dengan memberikan bantuan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan bangkitnya kembali ekonomi, yaitu sejumlah 80 miliar US Dollar.¹⁰

Dalam skrup yang lebih kecil, yaitu ASEAN, bantuan Jepang melalui ODA sudah terlihat dalam contoh sukses ODA yang sangat dihargai oleh negara-negara yang telah mencapai pembangunan ekonomi yang baik seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan Singapura dan Brunei Darussalam merupakan negara-negara yang sudah ‘lulus’ ODA (mantan penerima ODA). Disamping itu, juga dilakukan usaha bagi pembangunan di bidang-bidang yang lebih luas. Contohnya adalah pengembangan daerah sungai Mekong. Daerah aliran tersebut melalui 5 negara, yakni Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, dan satu daerah Cina. Proyek ini ditargetkan sebagai pembangunan daerah luas yang

melampaui batas negara, dipusatkan pada pembangunan jalan dan fasilitas pelabuhan. Berkat proyek tersebut, diharapkan dapat dikurangi kesenjangan yang ada di antara negara-negara anggota baru ASEAN.

BANTUAN JEPANG DAN CEAPAD

The Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) diselenggarakan di Tokyo pada 13-14 Februari 2013. Dari Jepang, Menteri Luar Negeri Fumio Kishida, Wakil Menteri Luar Negeri Shunichi Suzuki dan Duta Khusus Jepang untuk Timur Tengah Yutaka Iimura bertindak sebagai tuan rumah. Dari Palestina, Perdana Menteri Palestina Dr. Salam Fayyad juga berposisi sebagai tuan rumah bersama. Selain dari pihak Jepang dan Palestina, konferensi ini juga dihadiri para menteri dan pejabat senior dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Korea Selatan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Badan Bantuan dan Pembangunan Kembali PBB (UNRWA), Bank Pembangunan Islam, dan Liga Arab.¹¹

Pelibatan negara-negara Asia dalam CEAPAD ini tidaklah terlalu mengherankan mengingat semenjak Perang Dunia II Jepang mendasari kepentingan politik luar negerinya dengan fokus pada regional Asia. Lebih dari separuh dana bantuan luar negeri Jepang disalurkan untuk kawasan Asia. Jepang telah resmi mengumumkan kebijakan luar negeri *Asian Gateway*. Konsep ini berdasar pada tiga hal, yaitu pembentukan Jepang sebagai negara terbuka, kerjasama dengan Asia yang terbuka, dan menghormati keragaman Asia.

Mantan PM Shinzo Abe pernah berpidato mengenai dasar fundamental kebijakan luar negeri Jepang yang ditambahkan pada masa pemerintahan Shinzo Abe yaitu memfokuskan kepentingan luar negeri Jepang pada perwujudan kebebasan dan kemakmuran negara di Kawasan Jangkar Asia. Kawasan Jangkar Asia maksudnya adalah deretan kawasan regional Asia Tengah, Selatan, dan Tenggara. Negara-negara ini secara geografis berjejer menyerupai bentuk jangkar bagi Jepang. Dengan adanya fokus tersebut,

diharapkan bantuan yang diberikan Jepang bagi kawasan Jangkar ini dapat berbalik mendorong kemakmuran Jepang.

Pada intinya, CEAPAD merupakan sebuah konferensi internasional negara-negara Asia Timur untuk mendiskusikan cara-cara baru bantuan dan kerjasama dengan Palestina bagi upaya pembentukan negara tersebut. Konferensi ini dijalankan atas inisiatif Jepang untuk mendukung realisasi perdamaian melalui “solusi dua negara” “two-state solution”. Sementara CEAPAD berfungsi sebagai sebuah kerangka kerja untuk mendorong Negara-negara Asia melakukan kontribusi aktif bagi perdamaian Timur Tengah pada umumnya dan Palestina pada khususnya, konferensi ini juga ditujukan untuk membantu Negara-negara Asia Timur memperkuat dan mengembangkan hubungan kerjasama diantara mereka.¹²

Pada konferensi pertama ini, dicapai kesepakatan untuk menyelenggarakan CEAPAD secara teratur termasuk didalamnya diadakan ruang konsultasi yang terarah serta mengundang para pengusaha Asia dan Arab untuk mengembangkan bisnis skala kecil dan menengah, perdagangan dan investasi di Palestina dengan bekerjasama dengan Jaringan internasional bagi bantuan untuk Palestina.

Pada sesi pertama, PM Fayyad melaporkan status upaya pembentukan negara Palestina beserta kendala-kendala ekonomi dan politik. Berikutnya Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, Sekjen Liga Arab Dr. Nabil el-Aaraby, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Robert Serry dan Komisioner Jenderal U.N. Relief and Works Agency (UNRWA) Filippo Grandi. Pada intinya mereka mengemukakan mengenai status bantuan bagi Palestina dan kemungkinan-kemungkinan kerjasama diantara negara-negara dan organisasi-organisasi internasional. Pada sesi ini, Indonesia menyatakan kesediannya untuk menjadi tuan rumah pada 2014 mendatang.

Pada sesi berikutnya, Menteri Negara Senior Singapura Urusan Dalam Negeri dan Luar Negeri Masagos Zulkifli Bin Masagos Mohamad, Deputi Sekretaris Kementerian Luar Negeri Thailand Vijavat

Isarabhakdi mengutarakan status rencana bantuan mereka ke depan. Selain itu, mereka berkeinginan membagi pengalaman ekonomi mereka dengan Palestina. Presiden Islamic Development Bank Dr. Ahmed Mohamed Ali, Direktur Kawasan World Bank untuk Tepi Barat/West Bank dan Gaza Mariam Sherman, dan Wakil Presiden Senior JICA Hideaki Domichi membeberkan bantuan organisasi mereka bagi Palestina dan mengutarakan kemungkinan-kemungkinan kerjasama dengan Negara-negara Asia di masa datang.¹³

MOTIF JEPANG DIBALIK CEAPAD

Apa sebenarnya motif Jepang menyelenggarakan CEAPAD ini? Jika dilihat berdasarkan konsep Bantuan Luar Negeri seperti yang disinggung di bagian awal tulisan, apa yang dilakukan Jepang ini memang sarat dengan motif politik dan ekonomi. Dalam pandangan penulis, motif politik terasa lebih kental. Tidak dilibatkannya China dalam konferensi ini merupakan bukti bahwa Jepang sedang berusaha untuk mengurangi citra China yang memang sedang meningkat di kawasan Asia Timur. Di sisi lain, dengan cara ini Jepang sepertinya berusaha mendapatkan citra yang positif dari kawasan Arab dan sekaligus Asia—khususnya Asia Tenggara. Ini bisa dilihat dari diundangnya enam negara ASEAN pada konferensi tersebut, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam.

Citra positif dari kawasan Arab bisa diraih Jepang mengingat kondisi Timur Tengah yang tidak menentu belakangan ini didera oleh isu *Arab Spring* yang berkepanjangan. Amerika Serikat yang berada di balik upaya demokratisasi kawasan Timur Tengah mulai dipertanyakan kesahihannya dalam menyebarkan prinsip-prinsip demokrasi karena pada saat yang bersamaan terjadi pelanggaran pilar utama demokrasi, seperti tidak mengakui pemenang pemilu karena dianggap menganut ideologi yang radikal, kenyataan bahwa negara yang sudah menjalankan prinsip demokrasi namun terus mengalami gejolak politik, dan sebagainya. Dengan mendorong bantuan untuk Palestina, sepertinya Jepang berupaya mendapat

momentum bagus dari kawasan Arab mengingat Israel adalah sekutu dekat Amerika Serikat, momentum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan market di kawasan tersebut.

Bantuan untuk Palestina ini juga bisa menjadi momentum yang bagus bagi Jepang untuk “menjual” konsep *Human Security* secara lebih luas lagi. Meskipun alasan ini masih harus dikaji lebih lanjut, namun menurut penulis motif ini menarik untuk didalami mengingat salah satu bantuan untuk Palestina adalah terkait dengan nasib pengungsi Palestina yang tersebar tidak hanya di kawasan Timur Tengah saja. Pembicaraan tentang *Human Security* ini tidak dapat dilepaskan dari peran negara Jepang, khususnya melalui dua tokoh berikut ini: Mantan Ketua Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi Sadako Ogata dan Mantan Perdana Menteri Jepang Keizo Obuchi. Tercatat sejak kurun waktu 1998 hingga 2010 telah banyak kinerja yang dilakukan pemerintah Jepang terkait dengan penerapan *Human Security* ini berdasarkan pondasi yang telah diletakkan mereka berdua. Berikut ini data-data penting terkait hal tersebut¹⁴:

- 1994: *UN Human Development Report introduces the concept of human security*
- 1998: *Prime Minister Obuchi declares human security a core principle for Japan’s foreign policy framework at the first “Intellectual Dialogue on Building Asia’s Tomorrow” in response to the Asian financial crisis*
- 1999: *United Nations Secretariat and Japanese government launch UN Trust Fund for Human Security*
- 2000: *Prime Minister Yoshiro Mori announces the establishment of an international commission on human security (later named the Commission on Human Security or CHS) at the UN Millennium Summit*
- 2003: *CHS defines human security as a policy concept in the report on Human Security Now; Advisory Board on Human Security created within UN*
- 2003: *Government of Japan adds human security to*

its grant assistance item in its ODA budget (Grant Assistance for Grassroots and Human Security Projects)Japan's ODA Charter is revised, adding "the perspective of human security "

- 2005: *Medium-Term Policy on Official Development Assistance is announced, placing "human security" as the central focus of assistance*
- 2005: *Japanese government encourages adoption of article on human security in the resolution by the UN General Assembly (UNGA)*
- 2006: *Japanese government initiates an unofficial, open-ended forum for human security "Friends of Human Security (FHS)" in NY.*
- *April 6, 2010: with the encouragement of FHS, the first UN Secretary General report on human security was released*

Walaupun terlihat masih terasa nuansa konseptualnya ketimbang dari sisi praktisnya, tapi peran Jepang ini sangat penting terkait dengan perkembangan konsep *security* itu sendiri di dalam kajian hubungan internasional belakangan ini, terutama dalam penerapannya dalam isu-isu bantuan luar negeri yang dilakukan Jepang dan mengurangi penggunaan konsep *security* dalam pengertian yang tradisional.

Dalam konteks ASEAN, permasalahan Laut Cina Selatan merupakan permasalahan yang perkembangan terkini oleh beberapa kalangan dikatakan sebagai tanda perpecahan ASEAN. Pada pertemuan tingkat menteri ASEAN, pertama kalinya dalam 45 tahun tidak berhasil dikeluarkannya *communiqué* ASEAN. Mengingat krusialnya isu yang dibahas tidak heran bahwa beberapa kalangan melihat ini sebagai tanda perpecahan ASEAN. Salah satu sebab kegagalan dari KTT ini diperkirakan sebagai salah satu akibat dari intervensi Cina kepada negara ASEAN¹⁵. Disinyalir bahwa Kamboja sebagai tuan rumah dan penyelenggara dari KTT ini, yang dikenal sebagai sekutu dekat Cina di Asia Tenggara, mengikuti agenda yang dikehendaki Cina dan tidak maksimal mengupayakan kesepakatan diantara negara ASEAN. Di titik ini, Jepang sepertinya menemukan momentum untuk mendapatkan citra

positif dibalik menurunnya citra China.

Kesimpulan

Mengapa Jepang menjadi salah satu negara yang bisa bertahan ditengah berbagai masalah yang mendera—Perang Dunia, bencana alam, krisis ekonomi, politik internasional, dan sebagainya? Jawabannya sepertinya terletak pada kreatifitas negara ini untuk "menyulap" masalah tersebut menjadi peluang. Dan salah satu tongkat yang digunakan untuk melakukan itu adalah bantuan luar negerinya. Jepang merupakan salah satu negara yang aktif dalam memberikan bantuan pada tingkat pemerintah guna pembangunan negara-negara sedang berkembang dalam rangka membantu pembangunan ekonomi dan sosial mereka. Kebijakan dasar dari bantuan Jepang meliputi dukungan bagi usaha-usaha mandiri yang dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang dan meningkatkan keamanan manusia atau *human security*.

Bantuan tersebut merupakan representasi dari bentuk kontribusi Jepang yang sejak awal masa pemberiannya pada tahun 1970 diterima dengan baik di kalangan komunitas internasional. Bantuan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan ekonomi yang telah dicapai oleh Jepang sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia. Negara ini percaya bahwa bantuan yang diberikan tersebut akan kembali dalam bentuk yang menguntungkan bagi kelangsungan negara.

Tidak dapat disanggah secara konseptual bahwa pada setiap bantuan, termasuk dalam kerangka CEAPAD, mengandung motif-motif politis dan ekonomi. Namun terlepas dari itu, ditinjau dari kacamata ilmu Hubungan Internasional, fenomena bantuan internasional Jepang merupakan sebuah kajian yang terus menarik untuk dikaji dan didalami dalam konteks melihat sebuah negara berupaya untuk terus melanjutkan eksistensinya dengan kreatifitas tertentu yang khas. Banzai!

CATATAN AKHIR

- ² Lihat Marie Soderberg, *The Business of Japanese Foreign Aid: Five Case from Asia*. (New York: Routledge, 1996) dan Glenn D. Hook, et.al., *Japan's International Relations*. (New York: Routledge, 2001).
- ³ Stefan Cibian, "Foreign Aid in Disarray: Theoretical Gaps and Policy

- Failures. 26-29 March 2008. Presentation in International Studies Association's 49th Annual Convention "Bridging Multiple Divides" San Francisco USA. www.democracycenter.ro/ diakses 17 Maret 2013.
- ⁴ Ibid.
- ⁵ Louis A. Picard, *Foreign Aid and Foreign Policy: Lessons for the Next Half-Century*. (New York: M.E. Sharpe, Inc.2008), 20-33.
- ⁶ Eleanor Warnock, *Ekonomi Jepang Kritis* <http://indo.wsj.com/posts/2012/10/31/ekonomi-jepang-kritis/> diakses 24 Oktober 2013.
- ⁷ Japan International Cooperation Agency. "Diplomacy and development". June 2009. <http://www.africa-asia-confidential.com/> diakses 22 April 2013.
- ⁸ Lihat Lim Hua Sing, *Peranan Jepang di Asia* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- ⁹ Ibid.
- ¹⁰ Abdul Irsan, *Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia*, Jakarta:Grafindo, 2007. Lihat juga Alan H. Yang dan T. Y. Chen. 2012. "The Politics of Foreign Aid: A Positive Contribution to Asian Economic Growth", *Global and Strategies*, Juli-Desember, 6 (2): 231-245.
- ¹¹ Japan Daily Press. "Palestinian Prime Minister Fayyad inspired by East Asian nation-building". February 2013. <http://japandailynews.com/> diakses 18 Maret 2013.
- ¹² Ibid.
- ¹³ Ibid.
- ¹⁴ Lihat Ogata, Sadako. "Discuss nuts and bolts before deciding aid policy". www.asahi.com diakses 17 Juni 2013. dan Suzuki, Tomoko. 2012. "Japan as a Champion of Human Security". *Global Health Governance*, Volume VI, Issue 1 (Fall) <http://www.ghgj.org> diakses 17 Juni 2013
- ¹⁵ J. Perlez. 2012. *Asian Leaders at Regional Meeting Fail to Resolve Disputes Over South China Sea*. <http://www.nytimes.com> diakses 24 Oktober 2013

BIBLIOGRAFI

1. Buku

- Hook, Glenn D. et.al. *Japan's International Relations*. New York: Routledge, 2001.
- Irsan, Abdul. *Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia*. Jakarta:Grafindo, 2007.
- Lancaster, Carol. *Foreign Aid Diplomacy, Development, and Domestic Policy*. Chicago: The University of Chicago Press, 2007.
- Lancaster, Carol. *Foreign Aid in the Twenty-First Century: What Purposes?*. *Foreign Aid and Foreign Policy: Lessons for the Next Half-Century*. Transnational Trends in Governance and Democracy. New York: National Academy of Public Administration, 2008.
- Lippmann, Walter. *The Globalization of World Politics*. Oxford University Press, 1999.
- Picard, Louis A. *Foreign Aid and Foreign Policy: Lessons for the Next Half-Century*. New York: M.E. Sharpe, Inc., 2008.
- Sing, Lim Hua. *Peranan Jepang di Asia*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Soderberg, Marie. *The Business of Japanese Foreign Aid: Five Case from Asia*. New York: Routledge, 1996.

2. Artikel Dalam Jurnal

- Yang, Alan H. dan T. Y. Chen. "The Politics of Foreign Aid: A Positive Contribution to Asian Economic Growth", *Global and Strategies*, Juli-Desember, 6 (2), 2012.

3. Working Paper

- Ogata, Sadako. Fridtjof Nansen Memorial Lecture. United Nations University. 2001

4. Website

- Cibian, Stefan. "Foreign Aid in Disarray: Theoretical Gaps and Policy Failures". 26-29 March 2008. Presentation in International Studies Association's 49th Annual Convention "Bridging Multiple Divides" San Francisco USA. www.democracycenter.ro/ diakses 17 Maret 2013.
- Japan International Cooperation Agency. "Diplomacy and development". June 2009. <http://www.africa-asia-confidential.com/> diakses 25 April 2013.
- Japan Daily Press. "Palestinian Prime Minister Fayyad inspired by East Asian nation-building". February 2013. <http://japandailynews.com/> diakses 18 Maret 2013.
- Morden, Johanna. "Japan's New Role as Foreign Aid Broker". www.devex.com diakses 16 April 2013.
- Ogata, Sadako. "Discuss nuts and bolts before deciding aid policy". www.asahi.com diakses 17 Juni 2013.
- Perlez, J. 2012. *Asian Leaders at Regional Meeting Fail to Resolve Disputes Over South China Sea*. <http://www.nytimes.com> diakses 24 Oktober 2013
- Suzuki, Tomoko. 2012. "Japan as a Champion of Human Security". *Global Health Governance*, Volume VI, Issue 1 (Fall) <http://www.ghgj.org> diakses 17 Juni 2013
- Warnock, Eleanor. 2012. "Ekonomi Jepang Kritis". <http://indo.wsj.com/posts/2012/10/31/ekonomi-jepang-kritis/> diakses 24 Oktober 2013